

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Upaya Pemerintah Daerah adalah menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai pertanggungjawabann yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah didefenisikan sebagai seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus sistematis, akuntabel dan transparan guna terwujudnya pemerintahan yang bersih. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan mengadakan pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai tindakan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun

anggaran, laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila Pemerintah Daerah sudah menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BPK setiap tahun memberikan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit. Laporan keuangan yang berkualitas dilihat dari opini yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaan LKPD terdiri dari: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat/TMP, (PP No.71 Tahun 2010).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Flores Timur yaitu berdasarkan hasil audit BPK perwakilan NTT dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Flores Timur memperoleh

opini wajar dengan pengecualian (WDP). Permasalahan tersebut berkaitan dengan Kas di Bendahara Bos, Aset Gedung dan Bangunan, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menyajikan kas di Bendahara Bos per 31 Desember 2020 senilai Rp 4.613.889.672,81 nilai tersebut belum memenuhi syarat kualitatif laporan keuangan yang berkualitas karena nilai yang dicatat tidak sesuai dengan kondisi *riil*. Terdapat sisa kas di Bendahara Bos berupa SPJ yang tidak diakomodir dalam surat pengesahaan belanja (SPB) minimal senilai Rp 1.179.964.120,00. Hal ini tidak sesuai dengan defenisi kas dalam standar akuntansi pemerintahan dimana kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. (LHP BPK Propinsi Nusa Tenggara Timur atas LKPD Kabupaten Flores Timur).

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mendapat opini WDP sebanyak 3 kali berturut-turut terhitung sejak tahun pelaporan 2018-2020. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2018 pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapat opini WDP karena belum melakukan pengelolaan dana bos secara memadai, dan belum melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset tetap secara tertib. LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2019 juga belum mendapat opini WTP, karena masih terdapat permasalahan terkait Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin dan Beban Penyusutan. (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2018-2020).

Alfian (2015), tidak diperolehnya opini WTP oleh pemerintah daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya kelemahan sistem pengendalian internal, belum tertatanya barang milik negara atau daerah, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Indriasih (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam penyusunan laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah dilaksanakan oleh manusia. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Ulfa (2017) dan Evicahyani (2016), dimana kedua hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Karmila *et al* (2014) menghasilkan kondisi yang berbeda dimana kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah tidak dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen data keuangan memberikan keakuratan dan fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu karena teknologi informasi mendukung percepatan pemrosesan data transaksi, sehingga laporan keuangan dapat siap tepat waktu dan tidak kehilangan kualitasnya Wardani dan Nugroho, (2018). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan (Nurillah, 2014). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dilaksanakan oleh propinsi dan kabupaten/kota yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan laporan keuangan (Abidin, 2013).

Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2020, menyajikan saldo Aset Gedung dan Bangunan, konstruksi dalam pengerjaan (KDP), dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp 485.567.856.689,00; Rp 46.127.921.447,00; dan Rp 1.187.562.822.593,38, dari nilai-nilai tersebut, terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas penatausahaan dan penyajian yaitu minimal sebanyak 287 unit Aset Gedung dan Bangunan pada 67 SDN dan 29 SMPN belum dicatat dan dinilai, Aset KDP senilai 24.675.462.730,00 yang telah selesai dan dimanfaatkan belum dilakukan penyesuaian pencatatannya, dan perhitungan penyusutan aset tetap tidak mempertimbangkan penambahan manfaat

atas aset hasil kapitalisasi (LHP BPK Propinsi Nusa Tenggara Timur atas LKPD Kabupaten Flores Timur).

Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur belum berkualitas dilihat dari hasil pemeriksaan BPK. Laporan keuangan Kabupaten Flores Timur belum berkualitas karena belum memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang andal (informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral), yaitu laporan keuangan Kabupaten Flores Timur tahun 2018-2020 masih terdapat kesalahan penyajian pada aset tetap.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji kembali Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran tentang Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur?

2. Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur?
4. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur?
5. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

3. Untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
4. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Untuk mengetahui Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan referensi teori yang diperoleh dalam mengembangkan ilmu akuntansi keuangan daerah, serta penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis Penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan dan sumbangan informasi sebagai bahan pertimbangan mengenai kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan.